

BAB VI

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Paparan pada bab-bab terdahulu merupakan rangkaian alur penelitian yang ditujukan untuk menjelaskan permasalahan seperti yang telah dirumuskan sebelumnya. Kesimpulan yang dihasilkan dari bab ini berisi pandangan akhir sesuai dengan tahap perumusan masalah yang telah ada. Dengan demikian, kesimpulan berisi pandangan akhir tentang Moralitas Politik kiai; Studi Relasi Kiai dan Politik di Jawa Timur. Pemahaman yang dapat disarikan dari pembahasan penelitian ini, pada bab pertama hingga bab terakhir setidaknya dapat dikemukakan beberapa pokok pikiran yaitu;

1. Pada tataran ideal, relasi kiai dan politik di Jawa Timur tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling melengkapi dan mempengaruhi. Moral yang dimiliki kiai membawa politik menjadi sebuah dunia yang aman dan selalu ada dalam patron yang sebenarnya. Sedangkan politik menjadi wadah perjuangan moral di medan politik di satu sisi. Di sisi lain, politik memberikan akses networking untuk pengembangan, peluasan dan pembangunan pesantren. Namun pada realitasnya, politik yang penuh dengan intrik, penjegalan dan korupsi juga mempengaruhi kiai untuk tidak mengindahkan nilai-nilai moral yang sebelumnya dipahami. Keterlibatan kiai dalam politik juga didukung oleh struktur yang menaunginya. Menurut Giddens, struktur merupakan seperangkat aturan dan sumber

daya organisasi. Peraturan dan sumber daya tersebut tidak hanya bersifat membatasi (*constraining*) tetapi juga memberi peluang (*enabling*) kepada aktor untuk memilih tindakannya. Dengan demikian struktur merupakan jaringan organisasi aksi dan interaksi berproses. Menurut teori ini, keterseretan kiai dalam politik karena adanya dukungan lembaga yang memanfaatkan dan memperoleh manfaat dari perilaku politik tersebut, adanya seperangkat nilai dan aturan organisasi yang menjadi ruh suatu organ semakin memperkuat peran-peran politik kiai sebagai instrumen organisasi dalam berpolitik.

2. Moral dan politik adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Moral ketuhanan dan kemanusiaan yang dipahami kiai menjadi penuntun untuk berpartisipasi dalam politik praktis. Kiai yang aktif dalam politik praktis disebut dengan kiai politik. Kiai politik dalam penelitian disertasi ini terdapat tiga tipologi yaitu kiai makelar, kiai pejabat dan kiai (terkena) kasus. **Pertama**; kiai makelar politik (*Political Broker*) memiliki kecenderungan untuk tidak berperan secara aktif dalam dunia politik tetapi lebih memilih untuk berafiliasi dengan salah satu partai ataupun tokoh politik. Akan tetapi yang pasti dari hubungan keduanya terdapat proses transaksi seorang kiai bertindak sebagai pihak ketiga yang mencoba memediasi pemilih baik itu berasal dari massa di pesantren ataupun masyarakat umum untuk memberikan suara pada salah satu calon atau partai. Fenomena ini banyak di temukan dalam realitas politik di Jawa Timur. **Kedua**; kiai pejabat sebagai pemegang kekuasaan di struktur partai

politik, legislatif dan eksekutif. Dalam penelitian ini, aktifitas kiai politik sebagai pemegang kekuasaan terindikasi tidak untuk memperjuangkan ideologinya akan tetapi lebih pada orientasi mencapai kecukupan materi.

Ketiga; kiai (terjerat) kasus. Politik dalam pandangan masyarakat selalu diidentikkan dengan segala hal yang buruk, karena didalam politik banyak terdapat perilaku-perilaku yang bertentangan dengan moral. Posisi rumit ini kemudian membawa kiai pada sebuah pilihan antara mempertahankan idealitasnya sebagai pembentuk moral ataukah mengikuti alur yang membawa mereka pada tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Realitas politik yang kemudian terjadi di Jawa Timur membuktikan bahwa tidak jarang kiai mengorbankan idealitasnya hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau golongan. Mereka cenderung melakukan sebuah tindakan yang tidak mencerminkan pada moral yang mereka miliki. Penyebab terperosoknya kiai dalam berbagai kasus beragam, mulai dari keterdesakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi ataupun karena adanya tuntutan golongan yang memaksa mereka melakukannya. Perilaku korupsi yang dilakukan kiai lebih disebabkan pada kesilauan mereka terhadap kemewahan yang ada di politik. Mereka cenderung memiliki nafsu kekayaan yang sama dengan orang lain yang lebih kaya sehingga untuk memuaskan nafsunya segala cara dilakukan. Dalam realitas semacam ini kiai sudah mengorbankan moralnya hanya untuk mengejar kekayaan yang sifatnya sementara.

3. Berangkat dari tipologi kiai politik dalam penelitian disertasi ini dapat disarikan dan ditemukan peristilahan baru tentang moral yang dimiliki kiai di panggung politik. Dari berbagai prototipe tindakan kiai yang dipaparkan di awal bahwa kiai politik di Jawa Timur, jika dilihat dari orientasinya yang menonjol dapat diklasifikasi menjadi tiga kategori yaitu moral mediatif-transaksional, administratif-manipulatif dan pragmatis-faksionis.
- Pertama;** moral mediatif-transaksional. Dengan moral ini, kiai memberikan ruang pada tokoh politik untuk melakukan pencitraan. Kiai dengan moral mediatif-transaksional memiliki tipikal lebih terbuka. Kiai menganggap bahwa politik adalah sebagai media *networking* yang dapat memperluas jaringan pesantren, sehingga mengakomodir setiap kepentingan politik untuk mencapai kekuasaan. Disatu sisi, kekuasaan dianggap sebagai pengayom sehingga dirasa perlu untuk membuka ruang selebar-lebarnya bagi politik. Disisi lain, pesantren dianggap sebagai alat jual yang paling menguntungkan untuk mendulang suara dalam politik.
- Kedua;** moral administrasi-manipulatif. Bagi kiai pejabat, aturan administrasi menjadi harga mati yang harus sesuai dengan aturan kenegaraan. Karena jika salah penulisan administrasi akan terjerat sangsi birokrat. Aturan administrasi adalah aturan manusia yang dapat dimanipulasi, sehingga banyak penyimpangan-penyimpangan administrasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Untuk mensiasati administrasi tersebut sangatlah mudah yaitu dengan cara membuat administrasi yang sesuai dengan aturan Negara sekalipun berbeda dengan realitas yang

dikerjakannya. Pada taraf inilah, moralitas kiai yang menjadi pejabat dapat dianggap sebagai moralitas administratif-manipulatif yang hanya mementingkan aturan administratif tanpa menghiraukan moralitas agama yang tertanam dalam dirinya. **Ketiga**; moral pragmatis-faksionis adalah moral yang dimiliki oleh kiai yang menonjolkan diri dengan cara-cara pragmatis-opportunistic. Karakter yang meladasi moral ini adalah pragmatis-faksionis. Segala bentuk tindakannya berbasis pertimbangan apakah tindakan tersebut memiliki sumbangsih finansial pada dirinya ataupun golongannya.

B. Implikasi Teoritik

Ali Maschan Moesa membagi penelitian tentang kiai dalam lima kategori, yaitu, pertama, penelitian tentang paham keagamaan kiai, seperti tulisan Ali Haidar dan Martin van Bruinessen. Kedua, kajian tentang pola kepemimpinan kiai, seperti tulisan Zamakshari Dhofier, Clifford Geertz, Hiroko Horikhoshi, Sukanto serta Endang Turmudzi. Ketiga, adalah kajian tentang kesejarahan kiai, seperti tulisan Azumardi Azra. Keempat, adalah penelitian kiai tentang tema Islam dan Negara seperti Deliar Noer, Ahmad Syafi'i Ma'arif, Abdul Munir Mulkan serta tulisan Ali Maschan sendiri. Kelima, kajian figur dan biografi, seperti biografi KH. Abdurrahman Wahid, KH. Abdul Wahab Hasbullah dan biografi KH. As'ad Samsul Arifin. Melihat dai tipologi yang dimunculkan oleh Ali Maschan Moesa, tidak satupun penelitian yang mengungkap moralitas kiai di panggung politik. Pada taraf ini

penelitian disertasi ini menjadi penelitian yang menjadi varian baru corak kajian tentang kiai yaitu tentang moralitas politik kiai.

Penelitian tentang NU, pesantren dan partai politik pada era reformasi dapat dikelompokkan ke dalam tiga varian. Pertama, penelitian tentang peran NU dalam politik (terutama hubungannya dengan PKB). Misalnya kajian Asep Saiful Hamdani dan Ahmad Baso, Kedua penelitian tentang peran politik kiai dalam perpolitikan nasional. Kelompok yang kedua ini adalah Pramono U. Thantowi, Masdar F. Mas'udi, dkk., Nur Khalik Ridwan, Endang Turmudi, dan Muhtarom, Mujamil Qomar, Achmad Patoni. Ketiga, penelitian tentang partai politik yang berideologi Islam atau *platformnya* yang mendekati ideologi Islam. Kelompok yang ketiga ini adalah penelitian Zainal Abidin Amir, Ali Said Damanik, Syamsuddin, dan Abdul Chalik.

Penelitian yang menyinggung NU, Kiai, Pesantren dan politik sebagaimana dijelaskan diatas, penulis melihat hanya sebatas pada model partisipasi kiai, pesantren dan NU di dalam kancah politik. Sekalipun demikian penelitian ini boleh dikatakan sebagai lanjutan penelitian terdahulu di satu sisi, dan disisi lain, penelitian ini sebagai tambahan referensi baru untuk membedah politik kiai dari aspek moral politiknya. Oleh karena itu penelitian ini “mencoba” masuk lebih dalam tentang moralitas politik kiai.

Dipandang dari sudut teoritik, penelitian disertasi ini yang menjadikan moral kiai politik sebagai subjek adalah bangunan baru dalam dunia kiai politik. Pada taraf ini penelitian ini menghasilkan teori baru. Begitu juga ketika dilihat dari sudut tipologi kiai politik, tipologi kiai politik dalam

disertasi ini merupakan tipologi baru yang tidak ditemukan dalam penelitian lain. Hal ini dikarenakan perjalanan waktu yang selalu berubah sehinggamenyuguhkan realitas factual kiai politik baru yang lebih relevan dalam kajian kiai politik kontemporer ini.

C. Rekomendasi

Berpijak dari berbagai gagasan subyek penelitian yang telah diuraikan mulai bab pertama sampai terakhir. Penelitian ini sangat menarik untuk dikaji kembali dengan pendekatan yang berbeda. Temuan-temuan penelitian ini telah menggambarkan bahwa sosok kiai tidak bisa lepas dari panggung politik praktis. Oleh karena itu, kiai yang terjun dalam dunia politik menjadi keniscayaan sepanjang masih memegang teguh moral ketuhanan dan kemanusiaan yang melekat dalam tubuh kiai.

Berpijak dari penelitian ini, penulis memberikan catatan rekomendasi terhadap kiai politik. Pertama; jangan sekali-kali terjun dalam politik selama semangat mencari keuntungan duniawi yang bersifat material lebih dominan dari misi perbaikan moral bangsa. Kedua; kiai politik harus berpegang teguh terhadap moral ketuhanan dan kemanusiaan sehingga dapat menciptakan *ummatan wasāta*, umat yang berperdaban dengan berlandaskan moral agung. Ketiga; kiai politik seharusnya berpikir untuk kemaslahatan umat bukan kemaslahatan individual.